

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

Pada bagian ini, penulis akan menghadirkan sejumlah tinjauan teoritis dan konsep dari sejumlah variabel dan fenomena yang diteliti. Bagian pertama dalam tinjauan pustaka berisi tinjauan atas konsep dan teoritis dalam bentuk teks naratif yang didukung oleh sejumlah bahan pustaka seperti buku referensi, jurnal dan pustaka ilmiah lainnya. Sejumlah konsep yang akan dibahas secara tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh stabilitas politik, korupsi, kebebasan ekonomi, pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5. Bagian kedua berisi mengenai kerangka pemikiran yang menjadi kajian pada kerangka pemikiran pada penelitian ini dan bagian ketiga yaitu berisi mengenai hipotesis yang dikemukakan menjadi dugaan dasar dari upaya memecahkan masalah penelitian.

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai adanya perkembangan kegiatan perekonomian di mana produksi barang dan jasa dalam suatu negara mengalami peningkatan sehingga menyebabkan pendapatan riil nasional di negara tersebut berubah. Hal ini juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur terhadap berapa besar prestasi perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi agregat dapat dilihat dari seberapa besar Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Kondisi perekonomian dianggap

dalam kondisi yang baik jika PDB di negara tersebut tinggi. Sebaliknya, PDB yang rendah mengindikasikan bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang kurang baik. Adapun dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu melalui PDB perkapita di negara tersebut (Sukirno, 2004).

Menurut Simon Kuznets (Jhingan, 2011) pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana adanya peningkatan output hasil produksi ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan akibat adanya kemajuan teknologi serta diiringi oleh penyesuaian ideologi. Adapun menurut Boediono (1981) pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan output dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang di suatu negara. Terdapat tiga aspek dalam teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perkembangan suatu perekonomian sehingga akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kenaikan output per kapita di mana output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikatakan tumbuh jika dalam waktu jangka panjang (lima tahun) terjadi kenaikan output.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi beberapa teori berdasarkan hasil analisis para ahli pada zamannya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, neo klasik, endogen.

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik berkembang pada abad ke 17. Adam Smith dan David Ricardo merupakan penganut pertumbuhan ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Adam Smith menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tersedianya sumber daya alam dimana ketika sumber daya alam telah digunakan secara maksimal maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti, sumber daya manusia yaitu jumlah penduduk di mana proses pertumbuhan output memerlukan adanya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat, persediaan barang modal yang berpengaruh terhadap produksi dalam proses pertumbuhan output, serta luas tanah. dia menekankan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, menurut David Ricardo dalam teori ini berlaku *the law of diminishing return*, artinya teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku terus menerus karena semakin bertambahnya penduduk akan menyebabkan produksi marginal akan berkurang sehingga pendapatan nasional akan semakin mengalami perlambatan pertumbuhan, karena adanya tingkat penduduk yang tinggi akan menyebabkan upah menurun, sehingga menurunkan keuntungan dan menaikkan sewa tanah.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Penganut dari teori ini adalah Joseph Abramowitz Schumpeter dan Robert Solow. Dalam teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksi yaitu adanya proses inovasi. Todaro dan Smith, (2009) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor input yaitu

adanya akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Adapun persamaan dari teori ini adalah sebagai berikut.

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi

Dalam teori pertumbuhan neoklasik faktor terpenting adalah adanya pembentukan modal. menurut Solow pertumbuhan terjadi jika ada modal tenaga serta faktor teknologi yang bersifat eksogen. Selain itu, dalam teori ini kemajuan teknologi akan menentukan pencapaian perekonomian yang mapan.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan Solow di mana teori pertumbuhan Solow belum mampu menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan penyebab-penyebab adanya perkembangan teknologi. Dalam teori Solow pertumbuhan ekonomi disebabkan salah satunya oleh kemajuan teknologi. Namun, ia menganggap kemajuan teknologi ini bersifat eksogen yang masih bersifat asumsi.

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Paul Romer pada tahun 80- an. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari sistem yang mengatur proses produksi (endogen) bukan dari kekuatan yang berasal dari sistem yang ada sehingga faktor yang berasal dari dalam sistem ekonomi menjadi

faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2009).

Untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan maka perlu adanya tabungan dan investasi untuk mendorong hal tersebut. selain itu, ilmu pengetahuan termasuk ke dalam modal (K) dalam pertumbuhan endogen. Paul Romer pun menjelaskan bahwa tiga hal mendasar dalam pertumbuhan ekonomi endogen adalah adanya akumulasi ilmu pengetahuan akan menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih maju akibat adanya luberan pengetahuan (*knowledge spillover*) dan faktor produksi ilmu pengetahuan akan menyebabkan produksi barang konsumsi menjadi tidak terbatas (Romer, 1994).

Menurut Daniel Liberto dalam (instovedia, 2016) teori pertumbuhan endogen adalah teori ekonomi yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari dalam suatu sistem sebagai akibat langsung dari proses internal. Lebih khusus lagi, teori ini mencatat bahwa peningkatan modal manusia akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan bentuk teknologi baru dan cara produksi yang efisien dan efektif.

Teori pertumbuhan endogen menawarkan perspektif baru tentang apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa tingkat kemakmuran yang terus-menerus dipengaruhi oleh proses internal seperti modal manusia, inovasi, dan modal investasi, daripada kekuatan eksternal yang tidak terkendali, menentang pandangan ekonomi neoklasik.

Ekonom pertumbuhan endogen percaya bahwa peningkatan produktivitas dapat dikaitkan langsung dengan inovasi yang lebih cepat dan lebih banyak

investasi dalam sumber daya manusia. Dengan demikian, mereka mengadvokasi lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memelihara inisiatif inovasi dan menawarkan insentif bagi individu dan bisnis agar lebih kreatif, seperti pendanaan penelitian dan pengembangan (R&D) dan hak kekayaan intelektual.

Idenya adalah bahwa dalam ekonomi berbasis pengetahuan, efek limpahan dari investasi dalam teknologi dan orang-orang terus menghasilkan pengembalian. Sektor berbasis pengetahuan yang berpengaruh, seperti telekomunikasi, perangkat lunak, dan industri teknologi tinggi lainnya, memainkan peran yang sangat penting di sini.

Prinsip sentral untuk teori pertumbuhan endogen meliputi:

1. Kemampuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan suatu negara jika mengarah pada persaingan yang lebih ketat di pasar dan membantu merangsang produk dan proses inovasi
2. Ada peningkatan hasil dari investasi modal, terutama di bidang infrastruktur dan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi.
3. Investasi sektor swasta dalam R&D adalah sumber penting dari kemajuan teknologi
4. Perlindungan hak dan paten properti sangat penting untuk memberikan insentif bagi bisnis dan pengusaha untuk terlibat dalam R&D.
5. Investasi dalam sumber daya manusia adalah komponen vital dari pertumbuhan.
6. Kebijakan pemerintah harus mendorong kewirausahaan sebagai cara

menciptakan bisnis baru dan pada akhirnya sebagai sumber penting pekerjaan baru, investasi, dan inovasi lebih lanjut.

2.1.3 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan barang dan jasa yang diproduksi. Sehingga dalam mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan pendapatan domestik bruto riil yaitu menurut harga konstan. mengukur dua hal yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah belanja barang dan jasa. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total.

Dalam mengukur PDB (Produk Domestik Bruto) terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan. pendekatan dari sisi penawaran agregat bisa dilakukan dengan pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan . pendekatan dari sisi permintaan agregat yaitu pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan produksi produk domestik bruto merupakan jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sedangkan menurut pendekatan pendapatan, produk domestik bruto adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan, menurut pendekatan pengeluaran, produk domestik bruto adalah jumlah semua komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta (C), pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Sehingga persamaannya produk domestik bruto adalah $PDB = C + I + G + X - M$ (Mankiw, 2007).

2.1.4 Korupsi

Transparency International dalam laporan tahunan menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki tujuan untuk keuntungan pribadi. Kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan pribadi ini dapat berupa memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki.

Dalam kaitannya dengan peraturan, korupsi bisa dibagi menjadi dua kondisi. Korupsi dalam kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terjadi ketika seorang pejabat mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau secara ilegal setelah melakukan kegiatan yang sudah menjadi kewajibannya menurut Undang-Undang. Sedangkan, korupsi yang melanggar peraturan yang berlaku terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan dari kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan menurut Undang-Undang seperti adanya suap untuk melakukan sesuatu (*Transparency International*, 2012).

Bhargava (2005) dalam *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai adanya penggunaan kewenangan publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi. Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di suatu negara. *World Bank* memperkirakan bahwa lebih dari satu triliun USD dihabiskan untuk kegiatan suap setiap tahunnya dan negara yang mampu mengatasi korupsi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 400%.

Menurut Damanhuri (2006) terdapat tujuh jenis korupsi yaitu *transaktive*

(kolusi), *extortive* (memeras), *investive* (suap), nepotisme, *autogenic* (dilakukan seorang diri), *supportive* (bias kekuasaan), dan *defensive* (keterpaksaan) sedangkan Lopa (2001) membagi korupsi menjadi dua bentuk, yaitu *material/economic corruption* dan *political corruption*. Bentuk pertama, adalah yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) dengan manipulasi di bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara, dan yang kedua, berupa perbuatan manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi, paksaan, dan campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan dan sebagainya.

Faktor penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal. Menurut Karhi Nisjar (2005) ada empat hal yang dapat mempengaruhi tindak korupsi yaitu sistem administrasi yang lemah yang membuat terjadinya kebocoran, kesejahteraan aparatur yang rendah, adanya sistem hukum dan sanksi yang lemah yang belum mampu menangani korupsi yang merajalela serta tindakan kolusi yang cenderung sulit dibuktikan.

Menurut Klitgaard (1988), korupsi dapat menimbulkan kemiskinan karena semua keputusan dalam pengeluaran anggaran publik bergantung pada keuntungan pribadi serta adanya uang suap dari perusahaan yang melakukan kegiatan industri tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Adanya korupsi menandakan bahwa kualitas pemerintah suatu negara buruk. Pemerintah yang memiliki kualitas yang buruk bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Méon dan Sekkat (2008).

Dalam kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa korupsi lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi pembangunan. Korupsi menyebabkan adanya ketidakefisienan pembagian sumber daya dan dalam pemilihan produsen. Hal ini menimbulkan distorsi dalam penggunaan pendapatan negara yang berakhir ke kantong perorangan atau individu. Ketika hal-hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri.

2.1.5 Cara Mengukur Korupsi

Metodologi mengikuti empat langkah dasar: pemilihan sumber data, penskalaan ulang data sumber, menggabungkan data yang diskalakan ulang dan kemudian melaporkan ukuran ketidakpastian. Proses perhitungan juga menggabungkan mekanisme kontrol kualitas yang ketat yang terdiri dari perhitungan independen paralel yang dilakukan oleh dua peneliti internal dan dua penasihat akademik yang tidak berafiliasi dengan Transparency International.

1. Pemilihan sumber data

CPI mengacu pada 13 sumber data yang menangkap penilaian para ahli dan eksekutif bisnis pada sejumlah perilaku korupsi di sektor publik, termasuk:

- a. Penyuapan
- b. Pengalihan dana publik
- c. Penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi
- d. Nepotisme dalam pegawai negeri
- e. Penangkapan negara

Beberapa sumber juga melihat mekanisme yang tersedia untuk mencegah korupsi di suatu negara, seperti:

- a. Kemampuan pemerintah untuk menegakkan mekanisme integritas
- b. Penuntutan efektif pejabat korup
- c. Red tape dan beban birokrasi yang berlebihan
- d. Adanya undang-undang yang memadai tentang pengungkapan keuangan, konflik pencegahan kepentingan dan akses ke informasi
- e. Perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyidik

Setiap sumber data yang digunakan untuk menghitung IPK dievaluasi berdasarkan kriteria berikut:

A) Keandalan metodologis dan reputasi institusional: Agar suatu sumber dapat dimasukkan dalam IPK, perlu dipastikan kualitas dan kecukupan pendekatan metodologisnya. Untuk itu, setiap sumber harus berasal dari lembaga profesional yang secara jelas mendokumentasikan metode pengumpulan data dan pendekatan pengukurannya. Transparency International kemudian mengevaluasi kelayakan metodologi tersebut.

B) Penyelarasan konseptual data: Karena ini adalah ukuran korupsi di sektor publik, semua sumber data yang digunakan untuk menyusun IPK harus secara eksplisit dikaitkan dengan tingkat korupsi atau risiko korupsi di sektor publik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkaitan dengan 'jenis' korupsi yang ditentukan (misalnya, korupsi kecil-kecilan) atau dengan efektivitas mekanisme pencegahan korupsi, yang juga dapat digunakan sebagai proxy untuk tingkat korupsi yang dirasakan di suatu negara.

C) Perincian kuantitatif: Skala yang digunakan oleh sumber data harus memungkinkan diferensiasi yang memadai dalam data (yaitu, setidaknya skala empat poin) pada tingkat korupsi yang dirasakan di seluruh negara sehingga dapat diskalakan ulang ke CPI 0 -100 skala.

D) Keterbandingan lintas negara: Karena CPI memeringkat negara satu sama lain, data sumber juga harus sebanding secara sah antar negara dan tidak spesifik negara. Apalagi narasumber harus mengukur konsep yang sama lintas negara dan dengan skala yang sama. Meskipun saat ini tidak ada kriteria mengenai cakupan minimum yang harus dimiliki sumber untuk menjadi bagian dari CPI, sumber data dengan cakupan terendah memberikan skor untuk total 16 negara.

E) Ketersediaan data multi-tahun: Karena CPI mengukur korupsi lintas negara dan waktu, sumber yang menangkap persepsi korupsi untuk satu titik waktu, tetapi tidak dirancang untuk diulangi dari waktu ke waktu, tidak disertakan.

Untuk melaksanakan proses penjaminan mutu ini, Transparency International menjangkau masing-masing lembaga yang menyediakan data untuk memverifikasi metodologi yang digunakan untuk menghasilkan skor mereka. Karena beberapa sumber tidak tersedia untuk umum, Transparency International juga meminta izin untuk memublikasikan skor yang diskalakan ulang dari setiap sumber di samping skor gabungan CPI. Namun, Transparency International tidak diizinkan untuk membagikan skor asli yang diberikan oleh sumber-sumber pribadi kepada masyarakat umum.

2. Standarisasi sumber data

Setiap sumber yang termasuk dalam CPI distandarisasi untuk memungkinkan agregasi ke dalam skor CPI. Standarisasi mengubah semua poin data ke skala 0-100 di mana 0 mewakili tingkat korupsi yang dirasakan tertinggi, dan 100 tingkat korupsi yang dirasakan terendah. Sementara sebagian besar sumber CPI yang mendasari juga dikodekan ke arah yang sama (dengan skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari persepsi korupsi), empat sumber diskalakan dengan cara yang berlawanan, yaitu dengan skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Untuk tujuan perbandingan, keempat sumber ini dibalik dengan mengalikan setiap skor dengan -1. Sumber-sumber yang perlu dibalik adalah:

- a. Indikator korupsi Economist Intelligence Unit
- b. Skor korupsi Freedom House's Nations in Transit
- c. Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi Skor persepsi Intelijen Asia tentang korupsi
- d. Varietas Indeks korupsi politik Proyek Demokrasi

Karena banyak sumber yang digunakan untuk CPI tidak memiliki cakupan global, nilai-nilai yang hilang untuk sumber-sumber ini diperhitungkan untuk tahun dasar.² Proses ini dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak statistik STATA dan, lebih khusus lagi, perintah "impute" program. Perintah "impute" di STATA memperkirakan nilai untuk setiap titik data yang hilang hanya dengan menggunakan sumber data tersebut dengan setidaknya 50% dari total jumlah negara yang dicakup oleh CPI pada tahun tertentu.³ Ini dengan pengecualian data Indeks Transformasi Yayasan Bertelsmann, yang tidak

digunakan untuk imputasi Indikator Tata Kelola Berkelanjutan Yayasan Bertelsmann.

Setelah proses imputasi, mean dan standar deviasi untuk setiap sumber data dihitung dan digunakan sebagai parameter untuk membakukan data asli menjadi skor z. Skor z terstandarisasi dihitung dengan mengurangkan rata-rata setiap sumber dari skor masing-masing negara dan membaginya dengan standar deviasi dari masing-masing sumber. Hal ini menghasilkan kumpulan data yang berpusat di sekitar 0 dan dengan standar deviasi 1. Secara kritis, skor z dihitung menggunakan parameter mean dan standar deviasi dari sumber tahun dasar yang diperhitungkan. Ini memastikan bahwa skor CPI sebanding dari tahun ke tahun sejak tahun dasar.

Penting untuk dicatat bahwa kumpulan data lengkap dengan nilai yang diperhitungkan hanya digunakan untuk menghasilkan parameter global dasar dan nilai yang diperhitungkan itu sendiri tidak digunakan dalam agregasi akhir yang menghasilkan skor CPI.

Skor z kemudian ditransformasikan agar sesuai dengan skala CPI 0-100. Ini menggunakan rumus rescaling, yang bertujuan untuk menetapkan nilai rata-rata dari dataset standar menjadi 45, dan standar deviasi menjadi 20. Rumus berikut digunakan untuk tujuan ini:

$$\text{Rescaled Indicator}_{\text{Country}} = \frac{\text{original Indicator}_{\text{Country}} - \text{mean imputed indicator } x^{t=\text{baseline}}}{\text{standard imputed indicator } x^{t=\text{baseline}}} * 20 + 45$$

Setiap skor yang diskalakan ulang yang mengambil nilai lebih kecil dari 0 dibuat sama dengan 0 dan setiap skor yang diskalakan ulang yang melebihi 100 dibatasi hingga 100.

3. Gabungkan data

yang diskalakan ulang Skor CPI setiap negara dihitung sebagai rata-rata sederhana dari semua skor yang diskalakan ulang yang tersedia untuk negara tersebut. (Perhatikan, kami tidak menggunakan nilai yang diperhitungkan sebagai skor untuk CPI agregat.) Sebuah negara hanya akan diberikan skor jika setidaknya ada tiga sumber data yang tersedia untuk menghitung rata-rata ini.

4. Laporkan ukuran ketidakpastian

Skor CPI dilaporkan bersamaan dengan kesalahan standar dan interval kepercayaan 90 persen yang mencerminkan varians nilai data sumber yang terdiri dari skor CPI. Selanjutnya, perubahan skor CPI yang signifikan secara statistik diidentifikasi dan dilaporkan.

Mengikuti rekomendasi dari Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa audit koherensi konseptual dan statistic, rumus untuk menghitung kesalahan standar diubah mulai dari CPI2018. Rumus sebelumnya menghitung istilah kesalahan standar sebagai simpangan baku dari data sumber yang diskalakan ulang, dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah sumber. Rumus baru yang dinyatakan dalam persamaan di bawah ini memperhitungkan populasi sumber yang kecil:

$$\Sigma = \sqrt{\frac{N-n \sigma}{N-1 \sqrt{n}}}$$

dimana Σ adalah suku kesalahan standar, N adalah jumlah total sumber yang digunakan untuk perhitungan CPI, n adalah jumlah sumber untuk skor CPI negara tertentu, dan σ adalah standar deviasi skor CPI untuk negara tersebut.

Dengan menggunakan kesalahan standar ini, kita dapat menghitung interval kepercayaan 90 persen dan melaporkan batas atas dan bawah skor CPI untuk setiap negara, dengan asumsi distribusi normal.

Setelah menghitung kesalahan standar, kami menetapkan apakah perubahan skor CPI untuk setiap negara signifikan secara statistik atau tidak. Untuk tujuan ini, pertama-tama kita menghitung ukuran efek perbedaan antara skor satu negara dalam dua tahun yang dibandingkan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Effect size} = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{(N_1 - 1)SD_1^2 + (N_2 - 1)SD_2^2}{N_1 + N_2 - 2}}}$$

dimana M_1 adalah skor CPI untuk suatu negara pada tahun tertentu, M_2 adalah skor CPI untuk negara tersebut pada tahun perbandingan N_1 adalah jumlah sumber pada tahun tertentu, N_2 adalah jumlah sumber pada tahun perbandingan, SD_1^2 adalah kuadrat deviasi standar skor CPI pada tahun tertentu dan SD_2^2 adalah kuadrat deviasi standar skor CPI pada tahun tahun perbandingan.

Setelah didapat ukuran efek, selanjutnya menghitung simpangan baku (σ) dari ukuran efek menggunakan rumus di bawah ini:

$$\sigma(d) = \sqrt{\frac{N1+N2}{N1 \times N2} + \frac{d^2}{2 \times (N1+N2)}}$$

Dimana d adalah ukuran efek dari perbedaan skor IHK, dan $N1$ dan $N2$ adalah jumlah sumber yang tersedia untuk setiap negara. Kemudian, interval kepercayaan 90% dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$CI_{0,90} = d \pm 1.645 \times \sigma(d)$$

Jika interval kepercayaan ini termasuk nilai nol, maka tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara negara. Di sisi lain, jika nol berada di luar rentang, maka perbedaannya 'signifikan secara statistik pada tingkat 10%.

Transparency International (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global yang memimpin perang melawan korupsi. Melalui lebih dari sembilan puluh bab di seluruh dunia dan sekretariat internasional di Berlin, TI meningkatkan kesadaran akan dampak yang merusak dari tindakan korupsi dengan bermitra dengan pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan menerapkan langkah- langkah efektif untuk menanganinya. *Corruption Perception Index* adalah sebuah indeks yang dikeluarkan setiap tahunnya yang merupakan penggabungan dari tiga belas survei oleh sepuluh lembaga independen yang mengukur persepsi tingkat korupsi di seratus tujuh puluh delapan negara di dunia. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 100, 0 berarti dipersepsikan sangat korup, dan 100 sangat bersih.

2.1.6 Stabilitas Politik

Menurut Budiardjo (2003) politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses dalam membentuk

tujuan- tujuan. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut diperlukan kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi sumber daya alam yang ada.

Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi (2003) menyatakan bahwa ekonomi dan politik memiliki kaitan yang erat bahkan dalam teori Keynesian menyatakan bahwa dalam perekonomian harus dilakukan campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku politik memiliki peran dalam mengatur beberapa kegiatan perekonomian dan mengeluarkan kebijakan karena tidak selamanya mekanisme pasar mengarah pada perekonomian yang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel politik juga berpengaruh terhadap perekonomian.

Simon Kuznets (1973) dengan tegas menunjuk pada signifikansi lingkungan politik dan tipe pemerintahan. Kuznets menekankan bahwa, meskipun memajukan teknologi adalah kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, tetapi hal itu tidak memberikan cukup kondisi. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai hanya jika kemajuan teknologi digabungkan dengan institusi sosial politik yang stabil dan fleksibel yang menawarkan keleluasaan dan kebebasan sipil kepada warga negaranya.

Sistem politik yang demokratis memungkinkan partisipasi warga negara yang aktif, tetapi sukarela, melalui kekuatan pasar yang kompetitif, kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan. Ini memungkinkan agen ekonomi untuk menikmati kebebasan ekonomi untuk beroperasi dalam ekonomi pasar sehingga memiliki implikasi positif bagi pertumbuhan. Namun, perubahan yang sering terjadi dalam pemerintahan melalui metode non demokratis sering mengarah pada kebijakan

ekonomi yang berubah dan tidak menentu serta penolakan kebebasan politik dan kebebasan sipil. Lingkungan seperti itu dapat secara serius membatasi pertumbuhan ekonomi.

Mainwaring and Scully (1995) berpendapat bahwa lingkungan politik yang tidak stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang serta Powelson (2015) mengemukakan bahwa kelemahan institusional menjadi inti dari pembangunan ekonomi yang lambat di negara-negara yang kurang berkembang. Lingkungan kelembagaan merupakan hal yang penting dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Cara Mengukur Stabilitas Politik

Terdapat sebuah lembaga non-pemerintah yang berusaha mengukur stabilitas politik suatu negara yaitu World Governance Indicator (WGI). Kaufmann *et al* (2003) mengemukakan bagaimana lembaga ini melakukan pengukuran terhadap indeks kestabilan politik yaitu *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism Index*. Indeks ini berusaha menghitung kemungkinan pemerintahan suatu negara akan mengalami penggulingan melalui cara kekerasan atau tidak, seperti kekerasan politik dan adanya terorisme. Indeks ini menggabungkan beberapa indeks yang dihimpun dari badan penyedia informasi komersial yaitu Economist Intelligence Unit. Adapun indeks yang dihimpun adalah *orderly transfers, armed conflict, violent demonstration, social unrest*, serta *international tension* atau *terrorist threat*. Indeks ini bersumber dari penyedia informasi bisnis, serta organisasi sektor publik di seluruh dunia. Indeks yang dikeluarkan oleh WGI menggunakan angka dengan skala dari -2,5 sampai

2,5 di mana -2,5 mengindikasikan suatu negara memiliki stabilitas politik yang buruk dan 2,5 mengindikasikan suatu negara memiliki stabilitas politik yang baik kebebasan ekonomi.

Kebebasan ekonomi memiliki arti bahwa pemerintah memberikan hak kepada setiap individu untuk mengatur dan mengurus aktivitas ekonominya. Negara dengan kebebasan ekonomi yang tinggi berarti masyarakatnya memiliki keleluasaan dalam bekerja, melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan pembelian aset (Ayal dan Karras, 1998).

Dalam kajian empiris yang dilakukan oleh Yilmaz Bayar (2016) menemukan bahwa tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari oleh kebebasan ekonomi yang memiliki kaitan yang erat dengan masuknya investasi kapital untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

2.1.8 Kebebasan Ekonomi

Miller dan Kim (2013) menjelaskan bahwa *economic freedom* adalah kondisi dimana individu dapat bertindak dengan otonom saat mengejar mata pencaharian dan kesejahteraan yang lebih baik. *Economic freedom* adalah inti dari kemandirian individu, permasalahan utamanya adalah kebebasan dalam memilih dapat dinikmati oleh setiap individu dalam mencapai dan menggunakan barang dan sumber daya ekonomi. Asumsi dasar dari mereka yang menjunjung kebebasan ekonomi adalah setiap individu mengetahui kebutuhan mereka dan keinginan mereka, yang memimpin kehidupannya sendiri dengan berlandaskan filosofi dan prioritas individu masing-masing dari pada pemerintah atau elit teknokrat sebagai

pondasi dalam memenuhi eksistensi. Independen dan kesadaran diri mengalir dari kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk merawat diri sendiri dan kerabat adalah kontributor yang tak terhitung pada martabat manusia.

Pada ekonomi yang berbasis pada pasar, norma sosial adalah regulator utama. Norma seperti itu tumbuh secara alami dari dalam masyarakat itu sendiri, tercermin pada sejarah, budaya, dan pengalaman generasi-generasi dalam memahami cara hidup berdampingan satu dengan yang lain. Mereka membimbing pemahaman kita mengenai etika dalam hubungan personal, hubungan profesional, dan hubungan dengan pelanggan. Sistem politik demokratis, mencerminkan norma sosial dalam hukum dan regulasi, bahkan pemerintahan demokratis, jika tidak dibatasi oleh konstitusi atau batasan tradisional, akan memberikan ancaman yang besar terhadap *economic freedom*.

2.1.9 Mengukur *Economic Freedom*

Indeks *economic freedom* mengambil pandangan yang komprehensif mengenai kebebasan berekonomi. Beberapa aspek pada *economic freedom* memperhatikan interaksi suatu negara dengan negara lain. Secara umum, berfokus pada kebijakan di dalam suatu negara, menilai kebebasan individu dalam menggunakan tenaga kerja dan keuangan tanpa ada pembatasan dan campur tangan pemerintah.

Masing-masing aspek yang diukur dalam *economic freedom* memiliki peran vital dalam mempromosikan dan mempertahankan kemakmuran personal dan nasional. Semuanya saling mendukung dalam memberikan pengaruh. Namun, pertumbuhan di salah satu area seringkali mendukung bahkan menginspirasi

pertumbuhan di area lainnya.

Indeks *economic freedom* berfokus pada empat aspek kunci dari lingkungan ekonomi di mana pemerintah biasanya melakukan kontrol kebijakan:

1. *rule of law*,
2. *government size*,
3. *regulatory efficiency*, dan
4. *market openness*

Dalam menilai kondisi empat kategori ini, indeks ini mengukur dua belas komponen spesifik dari *economic freedom*, yang masing-masing dinilai pada skala dari 0 sampai 100. Skor dua belas komponen *economic freedom*, yang dihitung dari sejumlah sub-variabel, sama-sama ditimbang dan di rata-rata untuk menghasilkan nilai *economic freedom* secara keseluruhan untuk setiap perekonomian. Dibawah ini adalah penjelasan rinci metode yang digunakan.

2.1.9.1 Rule of Law

1. *Property Rights*

Komponen *property rights* menilai sejauh mana kerangka hukum suatu negara memungkinkan individu untuk mengakumulasi barang milik pribadi secara bebas, dijamin oleh undang-undang yang jelas bahwa pemerintah menggunakan undang-undang tersebut secara efektif. Mengandalkan campuran data survei dan penilaian independen, menyediakan ukuran kuantitatif dari tingkat dimana hukum suatu negara melindungi hak milik pribadi dan sejauh mana hukum-hukum dihormati. Hal ini juga menilai kemungkinan bahwa kepemilikan pribadi akan diambil alih oleh negara.

Semakin efektif perlindungan hukum properti, skor yang didapat akan lebih tinggi pada suatu negara. Demikian pula, semakin besar kemungkinan pengambilalihan properti oleh pemerintah, semakin rendah pula skor suatu negara.

Skor untuk komponen ini diperoleh dengan merata-rata skor lima sub-faktor berikut, yang semuanya berbobot sama:

- a. Hak kepemilikan fisik
- b. Hak kekayaan intelektual
- c. Kekuatan perlindungan investor
- d. Resiko pengambilalihan
- e. Kualitas administrasi pertanahan

Masing-masing sub-faktor yang berasal dari dataset numerik yang dinormalisasi untuk tujuan perbandingan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Sub Factor Score}_i = 100 \times \frac{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_i)}{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_{min})}$$

Di mana sub factor score i merupakan data asli untuk negara i ; sub factor max dan sub factor min mewakili batas atas dan bawah untuk set data yang sesuai; dan *Sub factor Score* i mewakili skor sub-faktor yang dihitung untuk negara i .

2. *Judicial Effectiveness*

Kerangka hukum yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk melindungi hak-hak semua warga negara terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain, termasuk oleh pemerintah dan pihak swasta yang kuat. Efektifitas peradilan memerlukan sistem peradilan yang efisien dan adil untuk memastikan bahwa hukum dihormati sepenuhnya, dengan melakukan

tindakan hukum yang tepat terhadap suatu pelanggaran.

Skor untuk komponen *judicial effectiveness* diperoleh dengan rata-rata skor untuk tiga sub-faktor berikut, yang semuanya berbobot sama:

1. Independensi peradilan
2. Kualitas proses peradilan
3. Kemungkinan memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan

Masing-masing *sub-factor* yang berasal dari dataset numerik yang dinormalisasi untuk tujuan perbandingan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\mathbf{Sub\ Factor\ Score}_i = 100 \times \frac{(\mathbf{Sub\ Factor}_{max} - \mathbf{Sub\ Factor}_i)}{(\mathbf{Sub\ Factor}_{max} - \mathbf{Sub\ Factor}_{min})}$$

Di mana *Sub factor Score_i* merupakan data asli untuk negara *i*; *Sub factor_{max}* dan *Sub factor_{min}* mewakili batas atas dan bawah untuk set data yang sesuai; dan *Sub factor Score_i* mewakili skor sub-factor yang dihitung untuk negara *i*.

3. *Government Integrity*

Korupsi mengikis *economic freedom* dengan memperkenalkan rasa tidak aman dan pemaksaan dalam hubungan ekonomi. Perhatian terbesar adalah korupsi sistemik lembaga pemerintah dan pengambilan keputusan oleh praktek-praktek seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, penggelapan, dan korupsi. Kurangnya integritas pemerintah disebabkan oleh praktek-praktek seperti mengurangi vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya dan pergeseran sumber daya ke dalam kegiatan lobi yang tidak produktif.

Skor untuk komponen ini diperoleh dengan rata-rata skor untuk enam sub-faktor berikut, yang semuanya berbobot sama:

- a. Kepercayaan publik terhadap politisi
- b. Pembayaran tidak jelas dan suap
- c. Transparansi kebijakan pemerintah
- d. Tidak adanya korupsi
- e. Persepsi korupsi
- f. Pemerintahan dan transparansi pelayanan sipil

Masing-masing *sub-factor* yang berasal dari dataset numerik yang dinormalisasi untuk tujuan perbandingan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Sub Factor Score}_i = 100 \times \frac{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_i)}{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_{min})}$$

Di mana *Sub factor Score_i* merupakan data asli untuk negara *i*; *Sub factor_{max}* dan *Sub facto* mewakili batas atas dan bawah untuk set data yang sesuai; dan *Sub factor Score_i* mewakili skor sub-factor yang dihitung untuk negara *i*.

2.1.9.2 Government Size

1. *Tax Burden*

Tax Burden adalah ukuran gabungan yang mencerminkan tingkat pajak marginal pada pendapatan pribadi dan perusahaan dan keseluruhan tingkat pajak (termasuk pajak langsung dan tidak langsung yang dikenakan pada semua tingkat pemerintahan) sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB). Skor

komponen berasal dari tiga sub-faktor kuantitatif:

- a. Tarif pajak tertinggi marjinal pada penghasilan individu
- b. Tarif pajak tertinggi marjinal pada penghasilan perusahaan
- c. Total beban pajak sebagai persentase dari PDB

Masing-masing variabel numerik tertimbang sama-sama sebagai satu-sepertiga dari nilai komponen. Bobot yang sama ini memungkinkan suatu negara untuk mencapai nilai setinggi 67 didasarkan pada dua faktor bahkan jika menerima skor 0 pada ketiga.

Skor *tax burden* dapat dihitung dengan fungsi biaya kuadrat untuk mencerminkan hasil pendapatan yang menurun dari tingkat yang sangat tinggi pada perpajakan. Data untuk setiap *sub-factor* dikonversi ke skala 100 poin menggunakan persamaan berikut:

$$\mathbf{Tax\ Burden}_{ij} = 100 - (\mathbf{Factor}_{ij})^2$$

Di mana *Tax Burden_{ij}* merupakan beban pajak di negara i untuk faktor j; *Factor_{ij}* merupakan nilai (persentase menyatakan pada skala 0 sampai 100) di negara i untuk faktor j; dan α adalah koefisien ditetapkan sama dengan 0,03. Skor minimum untuk masing-masing sub-faktor adalah nol, yang tidak terwakili dalam persamaan dicetak tetapi digunakan karena itu berarti bahwa tidak ada beban pajak yang tinggi tunggal akan membuat dua sub-faktor lain yang tidak relevan.

2. *Government Spending*

Komponen *Government Spending* menangkap beban yang dikenakan oleh pengeluaran pemerintah, yang meliputi konsumsi oleh negara dan semua pembayaran transfer terkait dengan berbagai program hak. Tidak ada upaya yang

telah dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat optimal dari belanja pemerintah. Tingkat ideal akan bervariasi dari satu negara ke negara, tergantung pada faktor-faktor yang berkisar dari budaya ke geografi untuk tingkatan perkembangan ekonomi. Di beberapa titik, bagaimanapun, pengeluaran pemerintah menjadi beban yang tidak dapat dihindari karena pertumbuhan dalam ukuran dan ruang lingkup sektor publik mengarah pasti kesalahan alokasi sumber daya dan kehilangan efisiensi ekonomi. Volume penelitian telah menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berlebihan yang menyebabkan defisit anggaran yang kronis dan akumulasi utang publik adalah salah satu yang paling serius pada dinamika ekonomi.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung skor pengeluaran pemerintah suatu negara adalah:

$$GE_i = 100 - \alpha(Expenditures_i)^2$$

Di mana GE_i merupakan skor pengeluaran pemerintah di negara i ; $Expenditures_i$ merupakan belanja pemerintah total rata-rata di semua tingkat sebagai persentase dari PDB selama tiga tahun terbaru; dan α adalah koefisien untuk mengendalikan variasi antara skor (ditetapkan pada 0,03). Skor komponen minimum adalah nol.

3. *Fiscal Health*

Pelebaran defisit dan beban utang yang berkembang, baik yang disebabkan oleh pengelolaan anggaran pemerintah yang buruk, menyebabkan erosi kesehatan fiskal suatu negara secara keseluruhan. Memburuknya kesehatan fiskal, berhubungan dengan ketidakstabilan ekonomi makro dan ketidakpastian ekonomi.

- a. Rata-rata defisit sebagai persentase dari PDB selama tiga tahun terbaru (80 persen dari nilai)
- b. Utang sebagai persentase dari PDB (20 persen dari skor).

Persamaan yang digunakan untuk menghitung skor kesehatan fiskal suatu negara adalah:

$$\mathbf{Sub\ factor\ Score}_i = 100 - \alpha(\mathbf{Sub\ factor}_i)^2$$

di mana $\mathbf{Sub\ factor\ Score}_i$ merupakan defisit atau nilai utang di negara i ; $\mathbf{Sub\ factor}_i$ merupakan nilai faktor sebagai bagian dari PDB; dan α adalah koefisien untuk mengendalikan variasi antara skor (ditetapkan pada 2 untuk defisit dan 0,01 untuk utang). Minimum skor sub-faktor adalah nol.

2.1.9.3 Regulatory Efficiency

1. *Business Freedom*

Komponen *business freedom* mengukur sejauh mana lingkungan peraturan dan infrastruktur membatasi operasi yang efisien dari bisnis. Skor kuantitatif berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhi kemudahan untuk memulai, operasi, dan menutup bisnis.

Skor kebebasan bisnis untuk setiap negara adalah angka antara 0 dan 100, dengan 100 menunjukkan lingkungan bisnis yang sangat bebas. Skor ini didasarkan pada tiga belas sub-faktor, yang semuanya berbobot sama, menggunakan data dari laporan Doing Business Bank Dunia:

- a. Memulai bisnis-prosedur (nomor)
- b. Memulai bisnis-waktu (hari)
- c. Memulai bisnis-biaya (% dari pendapatan per kapita)

- d. Memulai bisnis-minimum biaya (% dari pendapatan per kapita)
- e. Memperoleh lisensi-prosedur (nomor)
- f. Memperoleh lisensi-waktu (hari)
- g. Memperoleh lisensi-biaya (% dari pendapatan per kapita)
- h. Menutup bisnis-waktu (tahun)
- i. Menutup bisnis-biaya (% kepemilikan)
- j. Menutup bisnis-tingkat pemulihan (sen dalam dolar)
- k. Mendapatkan akses listrik-prosedur (nomor)
- l. Mendapatkan akses listrik-waktu (hari)
- m. Mendapatkan akses listrik-biaya (% dari pendapatan per kapita)

Masing-masing sub-faktor dikonversi ke skala 0 sampai 100, setelah itu rata-rata nilai dikonversi dan dihitung. Hasilnya mewakili kebebasan bisnis di negara itu dibandingkan dengan nilai kebebasan bisnis negara-negara lain.

Setiap sub-faktor dikonversi ke skala 0 sampai 100 menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Sub Factor Score}_i = 50 \times \left(\frac{\text{Sub Factor}_{average}}{\text{Sub Factor}_i} \right)$$

Hal ini didasarkan pada rasio data negara untuk setiap sub-faktor relatif terhadap rata-rata dunia, dikalikan dengan 50. Sebagai contoh, rata-rata di seluruh dunia, dibutuhkan dua puluh satu hari untuk memulai bisnis. Israel butuh dua belas hari untuk memulai bisnis, nilai sub-faktor Israel yang lebih baik dari rata-rata dunia, sehingga rasio 1,75. Rasio yang dikalikan dengan 50 sama dengan skor sub faktor akhir 87,5.

2. *Labor Freedom*

Komponen *labor freedom* adalah ukuran kuantitatif yang mempertimbangkan berbagai aspek dari kerangka hukum dan peraturan dari pasar tenaga kerja suatu negara, termasuk peraturan mengenai upah minimum, hukum menghambat PHK, persyaratan pesangon, dan ukuran peraturan penghambat penerimaan pekerjaan dan jam kerja, ditambah tenaga kerja memaksa tingkat partisipasi sebagai ukuran indikasi kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.

Tujuh sub-faktor kuantitatif yang ditimbang secara merata, dengan masing- masing dihitung sebagai satu per tujuh dari komponen kebebasan tenaga kerja:

- a. Rasio upah minimum untuk rata-rata nilai tambah per pekerja
- b. Halangan untuk mempekerjakan pekerja tambahan
- c. Kekakuan jam
- d. Kesulitan memecat karyawan yang berlebihan
- e. Periode pemberitahuan yang diamanatkan secara hukum
- f. Kewajiban pesangon
- g. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Dalam membangun skor kebebasan tenaga kerja, masing-masing tujuh sub- faktor dikonversi ke skala 0 sampai 100 berdasarkan persamaan berikut:

$$\text{Sub Factor Score}_i = 50 \times \left(\frac{\text{Sub Factor}_{average}}{\text{Sub Factor}_i} \right)$$

Dimana data negara *i* dihitung relatif terhadap rata-rata dunia dan kemudian dikalikan dengan 50. Tujuh skor sub-faktor tersebut kemudian dirata-ratakan untuk setiap negara, menghasilkan skor kebebasan tenaga kerja

dibandingkan dengan negara-negara lain.

3. *Monetary Freedom*

Monetary freedom menggabungkan ukuran stabilitas harga dengan penilaian harga kontrol. Inflasi dan harga kontrol mendistorsi aktivitas pasar. Stabilitas harga tanpa intervensi ekonomi mikro adalah negara yang ideal untuk pasar bebas.

- a. Skor untuk komponen kebebasan moneter didasarkan pada dua sub-faktor:

Tingkat inflasi rata-rata tertimbang selama tiga tahun terbaru dan

- b. Harga kontrol.

Tingkat inflasi rata-rata tertimbang selama tiga tahun terbaru berfungsi sebagai input primer menjadi suatu persamaan yang menghasilkan skor dasar untuk *Monetary Freedom*. Luasnya harga kontrol yang kemudian dinilai sebagai hukuman pengurangan hingga 20 poin dari skor dasar. Dua persamaan yang digunakan untuk mengkonversi tingkat inflasi ke final skor *Monetary Freedom* adalah:

$$\mathbf{Weighted\ Avg.\ Inflation}_i = \theta_1 \mathbf{Inflation}_{it} + \theta_2 \mathbf{Inflation}_{it-1} + \theta_3 \mathbf{Inflation}_{it-2}$$

$$\mathbf{Moneter\ Freedom}_i = 100 - \alpha \sqrt{\mathbf{Weighted\ Avg.\ Inflation}_i} - \mathbf{PC\ penalty}_i$$

Di mana θ_1 melalui θ_3 (thetas 1-3) mewakili tiga angka dengan jumlah 1 dan eksponensial lebih kecil secara berurutan; *Inflation* adalah nilai absolut dari tingkat inflasi tahunan di negara *i* selama tahun *t* yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen; α merupakan koefisien yang menstabilkan varian dari skor; dan harga kontrol hukuman (*PC penalty*) adalah nilai yang diberikan dari 0-20 poin hukuman berdasarkan pada sejauh mana kontrol harga.

2.1.9.4 Open Market

1. *Trade Freedom*

Trade freedom adalah gabungan ukuran dari hambatan tarif dan nontarif yang mempengaruhi impor dan ekspor barang dan jasa. Skor kebebasan perdagangan didasarkan atas dua input:

- a. Tingkat tarif rata-rata-tertimbang perdagangan
- b. Hambatan non tarif (NTB)

Impor yang berbeda memasuki suatu negara dapat (dan sering) menghadapi tarif yang berbeda. Tarif rata-rata tertimbang menggunakan bobot untuk setiap tarif berdasarkan pangsa impor untuk setiap yang barang. Tarif rata-rata tertimbang adalah ukuran murni kuantitatif dan *account* untuk perhitungan kebebasan perdagangan basis skor menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Sub Factor Score}_i = 100 \frac{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_i)}{(\text{Sub Factor}_{max} - \text{Sub Factor}_{min})} - \text{NTB}_i$$

Di mana *Trade Freedom_i* mewakili kebebasan perdagangan di negara *i*; *Tariff_{max}* dan *Tariff_{min}* mewakili batas atas dan bawah untuk tingkat tarif (%); dan *Tariff_i* mewakili tingkat rata-rata tertimbang tarif (%) di negara *i*. Tarif minimum secara alami nol persen, dan batas atas ditetapkan sebagai 50 persen. Hukuman NTB kemudian dikurangkan dari nilai dasar. Hukuman dari 5, 10, 15, atau 20 poin menurut skala berikut:

- a. 20-NTB digunakan secara ekstensif di banyak barang dan jasa dan / atau bertindak untuk menghambat sejumlah besar perdagangan internasional
- b. 15-NTB tersebar luas di banyak barang dan jasa dan / atau bertindak untuk menghambat mayoritas perdagangan internasional potensial

- c. 10-NTB yang digunakan untuk melindungi barang dan jasa tertentu dan menghambat beberapa perdagangan internasional
- d. 5-NTB jarang terjadi, melindungi beberapa barang dan jasa, dan / atau memiliki dampak yang sangat terbatas pada perdagangan internasional
- e. 0-NTB tidak digunakan untuk membatasi perdagangan internasional

2. *Investment Freedom*

Dalam sebuah negara yang bebas secara ekonomi, tidak akan ada kendala pada aliran modal investasi. Individu dan perusahaan akan diizinkan untuk memindahkan sumber daya mereka ke dalam dan keluar dari kegiatan tertentu, baik secara internal maupun lintas batas negara, tanpa pembatasan. Negara ideal akan menerima skor 100 pada komponen kebebasan investasi.

Dalam praktek bagaimanapun juga sebagian besar negara memiliki berbagai pembatasan atas investasi. Beberapa negara memiliki aturan yang berbeda untuk investasi asing dan domestik. Beberapa negara membatasi akses ke valuta asing. Beberapa negara memberlakukan pembatasan pembayaran, transfer, dan transaksi modal. Dalam beberapa negara, industri tertentu tertutup bagi investasi asing.

Indeks Investment Freedom mengevaluasi berbagai pembatasan peraturan yang biasanya dikenakan atas investasi. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dikurangkan dari skor ideal 100 untuk masing-masing pembatasan yang ditemukan dalam rezim investasi suatu negara. Hal ini tidak diperlukan bagi pemerintah untuk memaksakan semua pembatasan yang terdaftar di tingkat maksimum untuk menghilangkan kebebasan investasi. Beberapa pemerintah yang

memberlakukan begitu banyak pembatasan dimana secara total terdapat lebih dari 100 poin dalam pemotongan, dimana mereka memiliki nilai indeks nol.

- a. Pembatasan investasi
- b. Perlakuan nasional terhadap investasi asing
- c. Tidak ada perlakuan nasional, penyaringan 25 poin dikurangi
- d. Beberapa perlakuan nasional, beberapa penyaringan 15 poin dikurangi
- e. Beberapa perlakuan nasional atau penyaringan, 5 poin dikurangi
- f. Kode etik investasi asing
- g. Tidak ada transparansi dan birokrasi yang memberatkan, 20 poin dikurangi
- h. Implementasi kebijakan yang tidak efisien serta birokrasi yang tidak efisien, 10 poin dikurangi
- i. Beberapa hukum investasi dan praktek yang tidak transparan atau tidak efisien diimplementasikan, 5 poin dikurangi
- j. Pembatasan kepemilikan tanah:
- k. Semua pembelian perumahan dibatasi, 15 poin dikurangi
- l. Tidak ada pembelian asing terhadap perumahan, 10 poin dikurangi
- m. Beberapa pembatasan pembelian real estate 5 poin dikurangi
- n. Pembatasan investasi sektoral
- o. Banyak sektor dibatasi, 20 poin dikurangi
- p. Beberapa sektor dibatasi, 10 poin dikurang
- q. Satu atau dua sektor dibatasi, 5 poin dikurangi
- r. Perampasan investasi tanpa kompensasi yang adil
- s. Umum tanpa langkah yang legal 25 poin dikurangi

- t. Umum dengan beberapa langkah yang legal 15 poin dikurangi
- u. Jarang tapi terjadi, 5 poin dikurangi
- v. Mengontrol devisa
- w. Tidak ada akses dari orang asing atau penduduk, 25 poin dikurangi
- x. Akses tersedia tetapi sangat dibatasi, 15 poin dikurangi
- y. Akses yang tersedia dengan beberapa pembatasan, 5 poin dikurangi
- z. Mengontrol modal
- aa. Tidak ada repatriasi keuntungan; semua transaksi membutuhkan persetujuan pemerintah, 25 poin dikurangi
- bb. Ke dalam dan pergerakan kapital luar membutuhkan persetujuan dan menghadapi beberapa pembatasan, 15 poin dikurangi
- cc. Kebanyakan transfer disetujui dengan beberapa pembatasan, 5 poin dikurangi.

Hingga pengurangan tambahan sebesar 20 poin untuk masalah keamanan, kurangnya infrastruktur investasi dasar, atau kebijakan pemerintah lainnya yang membebani secara tidak langsung proses investasi dan batas investasi kebebasan.

3. *Financial Freedom*

Financial freedom merupakan indikator efisiensi perbankan serta ukuran kebebasan dari kontrol pemerintah dan gangguan di sektor keuangan. Kepemilikan negara dari bank dan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal mengurangi kompetisi dan umumnya menurunkan tingkat akses kredit.

Dalam lingkungan perbankan dan pembiayaan yang ideal ditandai dengan

tingkat minimum campur tangan pemerintah, pengawasan bank sentral yang independen dan regulasi lembaga keuangan dibatasi untuk menegakkan kewajiban kontrak dan mencegah penipuan. Kredit dialokasikan pada istilah pasar, dan pemerintah tidak memiliki lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai jenis jasa keuangan kepada individu dan perusahaan. Bank bebas untuk memperpanjang kredit, menerima deposito, dan melakukan operasi dalam mata uang asing. Lembaga keuangan asing beroperasi secara bebas dan diperlakukan sama dengan institusi domestik.

Skor indeks kebebasan finansial ekonomi dengan melihat lima bidang yang luas yaitu:

- a. Luasnya peraturan pemerintah terhadap jasa finansial
- b. Tingkat intervensi negara dalam bank dan perusahaan keuangan lainnya melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung
- c. Pengaruh pemerintah pada alokasi kredit
- d. Luasnya pengembangan pasar modal dan finansial
- e. Keterbukaan terhadap persaingan asing

Kelima bidang yang dianggap mampu menilai tingkat keseluruhan kebebasan finansial yang menjamin akses yang mudah dan efektif untuk peluang pendanaan bagi orang-orang dan bisnis dalam perekonomian. Skor keseluruhan pada skala 0 sampai 100 diberikan kepada kebebasan finansial ekonomi melalui pemotongan dari skor ideal 100.

- a. 90- Campur tangan pemerintah minimal. Peraturan lembaga keuangan minimal tapi mungkin melampaui penegakan kewajiban kontrak dan

mencegah penipuan.

- b. 80- Campur tangan pemerintah nominal. Kepemilikan pemerintah dari lembaga keuangan adalah bagian kecil dari aset sektor secara keseluruhan. Lembaga keuangan menghadapi hampir tidak ada pembatasan pada kemampuan mereka untuk menawarkan jasa keuangan.
- c. 70- Campur tangan pemerintah terbatas. Alokasi kredit dipengaruhi oleh pemerintah, dan alokasi swasta kredit menghadapi hampir tidak ada pembatasan. Kepemilikan pemerintah dari lembaga keuangan adalah cukup besar. Lembaga keuangan asing tunduk pada beberapa pembatasan.
- d. 60- Campur tangan pemerintah yang sedang. Perbankan dan peraturan keuangan yang agak memberatkan. Pemerintah latihan kepemilikan dan kontrol dari lembaga keuangan dengan porsi yang signifikan dari aset sektor secara keseluruhan. Kemampuan lembaga keuangan untuk menawarkan jasa keuangan tunduk pada beberapa pembatasan.
- e. 50- Campur tangan pemerintah yang cukup. Alokasi kredit secara signifikan dipengaruhi oleh pemerintah, dan alokasi kredit swasta menghadapi hambatan yang signifikan. Kemampuan lembaga keuangan untuk menawarkan jasa keuangan tunduk pada pembatasan yang signifikan. Lembaga keuangan luar negeri dikenakan beberapa pembatasan.
- f. 40- Campur tangan pemerintah yang kuat. Bank sentral tunduk pada pengaruh pemerintah, pengawasan lembaga keuangan adalah berat tangan, dan kemampuannya untuk menegakkan kontrak dan mencegah penipuan

- lemah. Pemerintah latihan kepemilikan aktif dan kontrol lembaga keuangan dengan saham minoritas besar aset sektor secara keseluruhan
- g. 30- Campur tangan pemerintah yang luas. Alokasi kredit dipengaruhi secara luas oleh pemerintah. Pemerintah memiliki atau mengendalikan mayoritas lembaga keuangan atau dalam posisi dominan. Lembaga keuangan sangat dibatasi, dan pembentukan Bank menghadapi hambatan yang signifikan. Lembaga keuangan asing tunduk pada pembatasan yang signifikan.
 - h. 20- Campur tangan pemerintah yang berat. Bank sentral tidak independen, dan pengawasan lembaga keuangan adalah represif. Lembaga keuangan asing sama atau sangat dibatasi.
 - i. 10- Hampir represif. Alokasi kredit dikendalikan oleh pemerintah. Pembentukan Bank dibatasi. Lembaga keuangan asing dilarang.
 - j. 0- Represif. Supervisi dan regulasi yang dirancang untuk mencegah lembaga keuangan swasta dari berfungsi. Lembaga keuangan swasta tidak ada.

“Hal yang sudah jelas dan sistem yang sederhana dari kebebasan alami terbentuk dengan sendirinya. Setiap manusia...bebas secara mutlak untuk mengejar cintanya dengan caranya sendiri....” -Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Book I Chapter VIII, p.96, para. 36, 1776.

Menarik kembali ke publikasi Adam Smith dalam “*The Wealth of Nations*” tahun 1776, menekankan pada pemahaman dasar institusi untuk melindungi kebebasan individu dalam mencapai minat berekonomi mereka untuk

menghasilkan kemakmuran yang lebih besar dalam masyarakat yang lebih luas.

(Sen, 2000), pemenang Nobel dalam Ekonomi juga membuat kontribusi yang dapat diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen menyampaikan bahwa “Pembangunan terdiri dari penghapusan dari beberapa tipe ketidakbebasan yang dapat membuat masyarakat memiliki pilihan yang sedikit dan kesempatan yang kecil dalam menggunakan peninggalan manusia dengan alasan yang masuk akal.”

2.1.10 Pertumbuhan Penduduk

1. Definisi Kependudukan

Badan Pusat Statistik (BPS) (2013) dalam Statistik kependudukan menyebutkan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu demografi penduduk atau warga suatu daerah didefinisikan menjadi dua:

- a. Orang yang tinggal di daerah tersebut
- b. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di

daerah lain.

Kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu disebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Kependudukan juga hal yang tidak bisa lepas dari negara Indonesia, karena negara Indonesia termasuk negara terbesar di dunia. Di samping itu, negara Indonesia juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Namun, dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi akan menimbulkan beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Berikut permasalahan yang dihadapi:

- a. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi
- c. Pernikahan usia dini
- d. Tingkat pemanfaatan program pemerintah masih kurang
- e. Struktur umur penduduk yang berusia
- f. Penyebaran penduduk yang tidak merata
- g. Urbanisasi yang relatif tinggi
- h. Kualitas sumber daya manusia rendah.

Dari beberapa faktor yang diungkapkan diatas, tingkat kelahiran menjadi

hal yang paling berpengaruh dalam meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran dipengaruhi berbagai macam, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program yang telah digalakkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan pemanfaatan program tersebut peran dari masyarakat sangat penting karena dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan program tersebut berarti proses pengendalian yang diusung oleh pemerintah bisa dikatakan berjalan dengan baik.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya. pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama masalah ketenagakerjaan, karena kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Melihat keadaan tersebut maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti struktur umur, makin meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi dan sebagainya.

Menghitung pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penduduk} = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}} \times 100\%$$

P_n : Jumlah Penduduk tahun sekarang

P_{n-1} : Jumlah Penduduk pada tahun sebelumnya

3. Faktor Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu negara secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, yakni:

a. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk melalui kelahiran bayi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Kelahiran bayi tersebut akan menambah tingkat pertumbuhan penduduk disamping migrasi masuk. Fertilitas atau kelahiran adalah kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara riil untuk melahirkan atau hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan serta sebuah tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi, kecukupan kalori dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini kan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan.

b. Kematian (Mortalitas)

Mortalitas merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk yaitu pengurangan jumlah penduduk dengan melalui kematian di suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya suatu penduduk dalam suatu negara.

c. Perpindahan Penduduk (Migrasi)

Migrasi dari desa ke kota akan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu akan memberikan dampak modernisasi serta memperbaiki kehidupan para migran. Migrasi dapat mengubah pandangan dan perilaku orang, menambah keterampilan dan membuat seseorang lebih mempunyai inovasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja.

Pertumbuhan penduduk merupakan sebuah keseimbangan dinamis antara kekuatan penambah dan kekuatan pengurang. Pertambahan penduduk yang meningkat disebabkan oleh bertambahnya kelahiran, akan tetapi secara bersama jumlah penduduk dikurangi oleh kematian orang-orang pada berbagai usia. Sementara pada situasi yang sama juga terjadi pada migrasi. Pertambahan penduduk terjadi karena jumlah migran yang masuk lebih besar dari pada migran yang keluar. Salah satu rintangan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan sekaligus merupakan ciri negara tersebut adanya ledakan penduduk. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan. Penduduk merupakan pendorong perekonomian karena perkembangan penduduk memungkinkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa, selanjutnya pertambahan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan suatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga ahli akan tetapi juga tenaga terampil, terdidik dan yang berpendidikan.

4. Hubungan pertumbuhan penduduk dengan pengangguran

Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi sangatlah penting. Dampak dari pertumbuhan penduduk bisa berakibat positif maupun negatif terutama pada perekonomian. Di negara maju pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut karena mereka sudah makmur, punya modal yang melimpah sedang buruh kurang. Di negara itu, kurva penawaran buruh pada sektor industri bersifat elastis sehingga tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bagaimanapun justru akan menaikkan produktivitas dan menghasilkan PNB (produk nasional bruto).

Akan tetapi di negara berkembang, akibat pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi, karena masalah kemiskinan serta modal yang kurang sedangkan buruh melimpah. Sehingga pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran.

Penduduk yang meningkat dengan cepat menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan. Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan kekurangan lapangan kerja meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal menjadi lambat dan kesempatan kerja kurang akibatnya pengangguran dan kekurangan pekerjaan meningkat. Hal tersebut pemecahannya bukan hanya meningkatkan kesempatan

kerja yang sepadan dengan jumlah pengangguran. Akan tetapi,

mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk secara aktif melalui program keluarga berencana yang dianjurkan pemerintah di negara tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Windy Ayu Astuti, Muhammad Hidayat, Ranti Darwin	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan	Variabel pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk	Investasi, Tenaga kerja
2	Mekki Hamdaoui, Saif Eddine Ayouni, Samir Maktouf	Capital Account Liberalization, Political Stability, and Economic Growth	Stabilitas politik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Stabilitas Politik, dan Pertumbuhan Ekonomi	Liberalisasi Akun Modal,
3	Haider Mahmood	Oil Prices, Control of Corruption, Governance, and Economic Growth Nexus in Saudi Arabia	Efek pengendalian korupsi ditemukan tidak signifikan terhadap ekonomi	Control of Corruption Economic Growth,	Growth, Oil Prices, Governance

4	Stephany Alessandra Benito Marroa , Leon Rivera Mallmaa and Wagner Vicente Ramosa	The Effects of Corruption on Peru's Economic Growth During the Period 1998-2018	Bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Corruption, Economic Growth	ARDL, Transmission channels
5	Muhammad Safar Nasir, Ana Rahmawati Wibowo, Dedy Yansyah	The Determinants of Economic Growth: Empirical Study of 10 Asia-Pacific Countries	Korupsi (CPI) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Economic Growth, Corruption, Population Growth,	Government Expenditure, Sand the Wheels Theory
6	Sekunmade J.O.	FDI, Economic Freedom and Economic Growth of Nigeria	Kebebasan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Economic Freedom, Economic Growth,	Foreign Direct Investment, Time Series, Unit Root, Uni-directional.
7	Muhammad Tariq Mahmood , Sadaf Shahab, dan Muhammad Shahbaz	The Relevance of Economic Freedom for Energy, Environment, and Economic Growth in Asia-Pacific	Kebebasan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Economic Freedom	Energy Intensity, CO2 Emissions, Carbon Intensity, ARDL, and Causality.

Region					
8	Fauzan dan Mahmuddin	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe	Pertumbuhan penduduk di kota Lhokseumawe. berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Population Growth and Economic Growth	Inflation,
9	Amy Roshaida	Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif tidak signifikan	Population Growth, Economic Growth	Family Welfare
10	Yılmaz Bayar	Impact of Openness and Economic Freedom on Economic Growth in The Transition Economies of The European Union	Kebebasan ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang	Economic Freedom, Economic Growth	Openness, Panel Data Analysis.
11	Muhammad Fajar, Zul Azhar	Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Korupsi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia	Economic Growth, Corruption,	Human Development Index

		di Negara-Negara Asia Tenggara	Tenggara.		
12	Baizatul Akman, Diana Sapha A.H	Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Korupsi di Indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonom	Corruption, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) and Economic Growth.	Pertumbuhan Penduduk, Kebebasan Ekonomi dan Stabilitas Politik
13	Lutfiana Fiqry Ichvani, Hadi Sasana	Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5	korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, ASEAN	Fixed Effect Model (FEM)
14	Yusuf Kurniawan Ririn, Tri Ratnasari, Indah Mustika	The Corruption and Human Development to the Economic Growth of Oil Countries	Korupsi tidak mempengaruhi terhadap produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.	Corruption Perception Index	Human Development Index, Gross Domestic Product, Organization of Islamic Cooperation (OIC)
15	Sri Nawatmi	Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara ASIA Pasifik	CPI (korupsi) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	IPK (CPI), Pertumbuhan Ekonomi	Data Pooling, Fixed Effect Model, dan Grease of Wheel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sintesis dari serangkaian teori yang telah dijabarkan dalam suatu kajian literatur atau pustaka yang menjadi dasar pada penggambaran secara sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi dan penjelasan pada masalah (Hamid, 2009). Adapun dalam melakukan pembuatan kerangka pemikiran maka diperlukan pendalaman dalam hubungan setiap variabel penelitian sehingga dapat merepresentasikan penelitian yang baik dan relevan. Hubungan ini dapat diidentifikasi melalui interaksi antar variabel dalam kajian teoritis dan mengacu temuan penelitian terdahulu. Kedua hal ini di kolaborasi untuk menentukan hubungan signifikansi dan posisi nilai koefisien hubungan.

2.3.1 Hubungan Stabilitas Politik dengan Pertumbuhan Ekonomi

Meier dan Baldwin (1957) menyatakan bahwa salah satu syarat yang diperlukan dalam pembangunan suatu negara adalah nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Lembaga yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kegiatan politik dan perekonomian suatu negara yaitu pemerintah. Menurut Méon and Sekkat (2008) pemerintah yang memiliki kualitas yang buruk bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kualitas ini diukur melalui ada atau tidaknya distorsi dalam kegiatan politiknya. Distorsi ini bisa dilihat dari tingkat korupsi di lingkungan pemerintah tersebut.

Simon Kuznets (1973) dengan tegas menunjuk pada signifikansi lingkungan politik dan tipe pemerintahan. Kuznets menekankan bahwa, meskipun memajukan teknologi adalah kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, tetapi

hal itu tidak memberikan cukup kondisi. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai hanya jika kemajuan teknologi digabungkan dengan institusi sosial politik yang stabil dan fleksibel yang menawarkan keleluasaan dan kebebasan sipil kepada warga negaranya.

2.3.2 Hubungan Korupsi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Klitgaard (1988), korupsi dapat menimbulkan kemiskinan karena semua keputusan dalam pengeluaran anggaran publik bergantung pada keuntungan pribadi serta adanya uang suap dari perusahaan yang melakukan kegiatan industri tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Adanya korupsi menandakan bahwa kualitas pemerintah suatu negara buruk. Pemerintah yang memiliki kualitas yang buruk bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Méon dan Sekkat (2008).

Dalam kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyebutkan bahwa korupsi lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi pembangunan. Korupsi menyebabkan adanya ketidakefisienan pembagian sumber daya dan dalam pemilihan produsen. Hal ini menimbulkan distorsi dalam penggunaan pendapatan negara yang berakhir ke kantong perorangan atau individu. Ketika hal-hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri.

2.3.3 Hubungan Kebebasan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kebebasan ekonomi memiliki arti bahwa pemerintah memberikan hak kepada setiap individu untuk mengatur dan mengurus aktivitas ekonominya. Negara dengan kebebasan ekonomi yang tinggi berarti masyarakatnya memiliki

keleluasaan dalam bekerja, melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan pembelian aset (Ayal dan Karras, 1998).

Muhammad Tariq Mahmood, Sadaf Shahab, dan Muhammad Shahbaz (2021) membuktikan bahwa tingkat kebebasan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari oleh kebebasan ekonomi yang memiliki kaitan yang erat meningkatkan pendapatan per kapita untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi

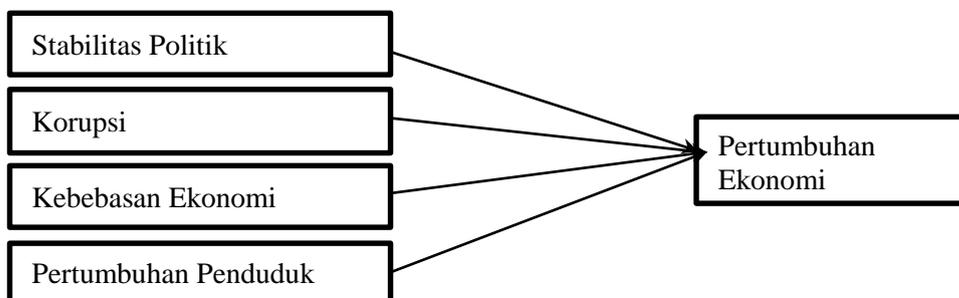
Adam Smith berpendapat bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yaitu jumlah penduduk merupakan faktor penting di mana proses pertumbuhan output memerlukan adanya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat. Namun, menurut David Ricardo adanya pertumbuhan penduduk secara terus menerus akan menyebabkan berlakunya *the law of diminishing return*, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku terus menerus karena semakin bertambahnya penduduk akan menyebabkan produksi marginal berkurang sehingga pendapatan nasional akan mengalami perlambatan pertumbuhan, karena adanya tingkat penduduk yang tinggi akan menyebabkan upah menurun, sehingga menurunkan keuntungan dan menaikkan sewa tanah.

Ayu Astuti, Muhammad Hidayat, Ranti Darwin (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari oleh Variabel pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Pelalawan dengan probabilitas variabel pertumbuhan penduduk sebesar 0,04 lebih kecil dari taraf nyata lima persen. Nilai koefisien variabel pertumbuhan penduduk adalah sebesar negatif 1,73E-05 yang artinya jika pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan satu jiwa maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 1,73E-05 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.5 Diagram Kerangka Pemikiran

Diagram untuk kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang divisualisasikan ke dalam bentuk grafik bergaris. Dengan melihat hubungan secara teoritis dan aplikasi dalam deskripsi di atas maka dapat dibuatkan dalam model yang sederhana dan sistematis yang disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau sebaliknya salah. Hipotesis juga adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik dengan data

(Prasetyo, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji sebagai berikut:

- a. Diduga stabilitas politik, korupsi, dan indeks kebebasan ekonomi secara parsial berpengaruh positif serta pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.
- b. Diduga stabilitas politik, Korupsi, kebebasan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.